



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 78 TAHUN 2023  
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN BESARAN  
ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 96 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 76);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
4. Rasio Jumlah Penduduk Kalurahan yang selanjutnya disingkat RJPKal adalah hasil pembagian jumlah Penduduk Kalurahan suatu Kalurahan terhadap keseluruhan jumlah Penduduk Kalurahan se-Kabupaten Bantul.
5. Rasio Penduduk Miskin Kalurahan yang selanjutnya disingkat RPMKal adalah hasil pembagian jumlah Penduduk Miskin Kalurahan suatu Kalurahan terhadap keseluruhan jumlah Penduduk Miskin Kalurahan se-Kabupaten Bantul.

6. Rasio Luas Wilayah Kalurahan yang selanjutnya disingkat RLWKal adalah hasil pembagian Luas Wilayah suatu Kalurahan terhadap keseluruhan jumlah Luas Wilayah Kalurahan se-Kabupaten Bantul.
7. Rasio Indeks Kesulitan Geografis Kalurahan yang selanjutnya disingkat RIKGKal adalah hasil pembagian Indeks Kesulitan Geografis suatu Kalurahan terhadap keseluruhan jumlah Indeks Kesulitan Geografis Kalurahan se-Kabupaten Bantul.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
9. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau atau pemerintah kabupaten untuk program jaminan kesehatan.
10. Rekening Kas Kalurahan adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kalurahan yang menampung seluruh penerimaan Kalurahan dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kalurahan dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
11. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
12. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
14. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.
15. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
16. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah nama lain Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
17. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah organisasi masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat masyarakat setempat dalam rangka memelihara dan melestarikan kerukunan kehidupan masyarakat antar tetangga berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan.
18. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
19. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah program pelayanan kesehatan dari pemerintah yang berwujud BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan sistemnya menggunakan sistem asuransi.
20. Bupati adalah Bupati Bantul.
21. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
22. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan yang selanjutnya disingkat DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul.

23. Panewu adalah unsur Perangkat Daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kapanewon.
24. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

## BAB II

### PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

#### Bagian Kesatu

##### Pengalokasian Alokasi Dana Desa

##### Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

###### Pasal 2

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

###### Pasal 3

- (1) Pengalokasian ADD setelah kebijakan umum anggaran dan penetapan pagu anggaran sementara APBD disepakati bersama antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Pengalokasian ADD merupakan jumlah ADD yang diterima Kalurahan untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

#### Bagian Kedua

##### Penentuan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kalurahan

###### Pasal 4

- (1) Jumlah ADD yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp102.415.885.000,00 (seratus dua miliar empat ratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (2) Penentuan besaran ADD yang diberikan untuk setiap Kalurahan dengan mempertimbangkan indikator sebagai berikut:
  - a. kebutuhan belanja wajib penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
  - b. RJPKal, RPMKal, RLWKal, dan RIKGKal;
  - c. bagian rata untuk setiap Kalurahan;
  - d. subsidi bagi Kalurahan yang mengalami penurunan besaran ADD; dan
  - e. penambahan selisih perhitungan ADD untuk 15 Kalurahan yang mendapatkan subsidi.
- (3) Selisih perhitungan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dihitung berdasarkan pengurangan dari ADD yang dianggarkan pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi alokasi ADD berdasarkan kebutuhan belanja wajib penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, RJPKal, RPMKal, RLWKal, dan RIKGKal, bagian rata untuk setiap kalurahan, dan subsidi bagi Kalurahan yang mengalami penurunan besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d.
- (4) Besaran ADD sesuai indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
  - a. kebutuhan belanja wajib penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan sebesar Rp75.754.348.800,00 (tujuh puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
  - b. RJPKal, RPMKal, RLWKal, dan RIKGKal sebesar Rp21.481.739.700,00 (dua puluh satu miliar empat ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);

- c. bagian rata untuk setiap Kalurahan sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
  - d. subsidi bagi Kalurahan yang mengalami penurunan besaran ADD sebesar Rp1.419.465.700 (satu milyar empat ratus sembilan belas juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah); dan
  - e. penambahan selisih perhitungan ADD sebagaimana pada ayat (2) huruf e sebesar Rp10.329.000,00 (sepuluh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- (5) Besaran ADD yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi dengan besaran ADD sesuai indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat selisih sebesar Rp1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah).
- (6) Selisih sebesar Rp1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari pembulatan ADD.
- (7) Selisih sebesar Rp1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimasukkan dalam besaran ADD untuk Kalurahan Pendowoharjo.

#### Pasal 5

- (1) Kebutuhan belanja wajib penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri atas :
  - a. penghasilan tetap Lurah, pamong Kalurahan, dan staf pamong Kalurahan selama 12 (dua belas) bulan;
  - b. tunjangan kedudukan anggota Bamuskal selama 12 (dua belas) bulan;
  - c. operasional Bamuskal dalam 1 (satu) tahun;
  - d. insentif RT sesuai dengan jumlah RT.
- (2) Besaran ADD setiap Kalurahan berdasarkan kebutuhan penghasilan tetap lurah, pamong Kalurahan dan staf pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (3) Besaran ADD setiap Kalurahan berdasarkan jumlah anggota Bamuskal dan operasional Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (4) Besaran ADD setiap Kalurahan berdasarkan jumlah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Perhitungan besaran ADD berdasarkan RJPKal, RPMKal, RLWKal, dan RIKGKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dibagi secara proporsional.
- (2) Pembagian secara proporsional dimaksud pada ayat (1) berdasarkan bobot setiap rasio indikator sebagai berikut:
  - a. RJPKal sebesar 30% (tiga puluh persen);
  - b. RPMKal sebesar 30% (tiga puluh persen);
  - c. RLWKal sebesar 20% (dua puluh persen); dan
  - d. RIKGKal sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Besaran ADD setiap Kalurahan berdasarkan perhitungan formula RJPKal, RPMKal, RLWKal, dan RIKGKAL tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 7

- (1) Perhitungan Besaran ADD berdasarkan bagi rata untuk setiap Kalurahan sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c diberikan untuk 75 (tujuh puluh lima) Kalurahan.
- (2) Setiap Kalurahan mendapat ADD berdasarkan bagi rata sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

### Pasal 8

- (1) Perhitungan besaran ADD berdasarkan subsidi bagi Kalurahan yang mengalami penurunan besaran ADD sebesar Rp1.419.465.700 (satu milyar empat ratus sembilan belas juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) huruf d berdasarkan penyesuaian besaran ADD yang diterima Kalurahan pada tahun 2023.
- (2) Jumlah Kalurahan yang mendapat ADD berdasarkan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 15 (lima belas) Kalurahan.
- (3) Besaran ADD berdasarkan subsidi setiap Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
  - a. Kalurahan Tirtohargo sebesar Rp69.535.600,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah);
  - b. Kalurahan Caturharjo sebesar Rp37.995.000,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
  - c. Kalurahan Tirtoharjo sebesar Rp22.490.700,00 (dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah);
  - d. Kalurahan Sabdodadi sebesar Rp61.195.200,00 (enam puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
  - e. Kalurahan Kebonagung sebesar Rp167.023.200,00 (seratus enam puluh tujuh juta dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
  - f. Kalurahan Girirejo sebesar Rp113.408.600,00 (seratus tiga belas juta empat ratus delapan ribu enam ratus rupiah);
  - g. Kalurahan Karangtalun sebesar Rp96.075.300,00 (sembilan puluh enam juta tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
  - h. Kalurahan Imogiri sebesar Rp222.218.700,00 (dua ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus rupiah);
  - i. Kalurahan Muntuk sebesar Rp11.509.000,00 (sebelas juta lima ratus sembilan ribu rupiah);
  - j. Kalurahan Jatimulyo sebesar Rp7.662.300,00 (tujuh juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
  - k. Kalurahan Jagalan sebesar Rp277.088.500,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
  - l. Kalurahan Singosaren sebesar Rp256.815.300,00 (dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima belas ribu tiga ratus rupiah);
  - m. Kalurahan Segoroyoso sebesar Rp43.000.400,00 (empat puluh tiga juta empat ratus rupiah);
  - n. Kalurahan Bawuran sebesar Rp16.278.000,00 (enam belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah); dan
  - o. Kalurahan Ngestiharjo sebesar Rp17.169.900,00 (tujuh belas juta seratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

### Pasal 9

Penambahan selisih perhitungan ADD sebesar Rp10.329.000,00 (sepuluh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e diberikan sebesar Rp688.600,00 (enam ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) untuk setiap Kalurahan penerima subsidi.

**Bagian Ketiga**  
**Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kalurahan**  
**dan Pembagian Setiap Bulan**

**Pasal 10**

- (1) Besaran ADD untuk setiap Kalurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembagian besaran ADD tahun 2024 setiap bulan untuk setiap Kalurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Keempat**  
**Penggunaan Alokasi Dana Desa**

**Pasal 11**

- (1) ADD diprioritaskan untuk membiayai kegiatan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, khususnya untuk :
  - a. pemenuhan penghasilan tetap minimal Lurah, pamong Kalurahan dan staf pamong Kalurahan;
  - b. tunjangan Bamuskal;
  - c. biaya operasional Bamuskal;
  - d. operasional Pemerintah Kalurahan;
  - e. insentif/operasional RT
  - f. tunjangan jaminan ketenagakerjaan Lurah, pamong Kalurahan, staf pamong Kalurahan dan staf kalurahan; dan
  - g. tunjangan jaminan kesehatan bagi Bamuskal, staf pamong Kalurahan dan staf Kalurahan.
- (2) Dalam hal kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah tercukupi, ADD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kalurahan.

**Bagian Kelima**  
**Mekanisme Penyaluran**

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 12**

- (1) Penyaluran ADD dilakukan setelah Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan dan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan ditetapkan.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan dengan cara transfer langsung dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kalurahan setiap bulan.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2024

**Paragraf Kedua**  
**Mekanisme Penyaluran bulan Januari Tahun 2024**

**Pasal 13**

- (1) Persyaratan pencairan dana ADD tahap I (kesatu) adalah sebagai berikut:
  - a. salinan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan tahun 2024;

- b. salinan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan Tahun 2024;
  - c. bukti Pengeluaran Kas/Bend 26;
  - d. kwitansi;
  - e. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Kalurahan; dan
  - f. fotokopi Rekening Kas Kalurahan.
- (2) Lurah menyampaikan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati melalui Panewu disertai dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada tanggal 22 (dua puluh dua) bulan Januari tahun berjalan.
- (3) Berdasarkan permohonan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat pada tanggal 26 (dua puluh enam) bulan Januari tahun berjalan, Panewu mengajukan permohonan penyaluran ADD untuk seluruh Kalurahan di wilayahnya kepada Bupati Cq. Kepala DPMK dengan dilampiri :
- a. rekapitulasi jumlah permohonan dana ADD tiap Kalurahan; dan
  - b. lembar penelitian berkas pengajuan penyaluran ADD.
- (4) Berdasarkan permohonan dan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat pada tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Januari tahun berjalan, Kepala DPMK mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati Cq. Kepala BPKPAD.
- (5) Penyaluran ADD bulan Januari Tahun 2024 dilakukan paling lambat akhir bulan Januari tahun 2024.

**Paragraf Ketiga  
Mekanisme Penyaluran Bulan Februari  
Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2024**

**Pasal 14**

- (1) Persyaratan pencairan ADD bulan Februari sampai dengan bulan Desember tahun 2024 adalah sebagai berikut:
- a. bukti Pengeluaran Kas/Bend 26;
  - b. kwitansi;
  - c. fotokopi rekening koran bulan sebelumnya;
  - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Kalurahan;
- (2) Lurah mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati melalui Panewu disertai dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
- (3) Berdasarkan permohonan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal 1 (satu) bulan berikutnya, Panewu mengajukan permohonan penyaluran ADD untuk seluruh Kalurahan di wilayahnya kepada Bupati Cq. Kepala DPMK dengan dilampiri :
- a. rekapitulasi jumlah permohonan dana ADD per Kalurahan; dan
  - b. lembar penelitian berkas pengajuan penyaluran ADD lembar penelitian berkas pengajuan penyaluran ADD;
- (4) Berdasarkan permohonan dan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal 1 (satu) bulan berikutnya Kepala DPMK mengajukan permohonan pencairan dana ADD kepada Bupati Cq. Kepala BPKPAD.
- (5) Penyaluran ADD bulan berikutnya dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.

#### Paragraf 4

Pemotongan dan Penyetoran Jaminan Kesehatan dari Alokasi Dana Desa

#### Pasal 15

- (1) Penanggung jawab administrasi JKN Kalurahan melakukan entri data kepesertaan melalui aplikasi *e-dabu* untuk Lurah, Carik, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Dukuh paling lambat 6 (enam) hari kalender sebelum tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
- (2) Penanggung jawab administrasi JKN Pemerintah Kabupaten melakukan persetujuan melalui aplikasi *dabu* atas entri yang dilakukan oleh penanggung jawab administrasi JKN Kalurahan paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum tanggal 1 (satu) bulan berikutnya untuk tagihan iuran bulan berikutnya.
- (3) BPJS Kesehatan menyampaikan tagihan Iuran mulai tanggal 1 (satu) bulan berjalan kepada Pemerintah Kabupaten cq. Kepala BPKPAD.
- (4) BPKPAD selaku PPKD melakukan penyetoran Iuran kepada BPJS Kesehatan berdasarkan hasil pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing Kalurahan yang diajukan setiap bulannya.
- (5) Penyetoran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui rekening BPJS Kesehatan.
- (6) Pembayaran langsung Iuran kepada BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 setiap bulan.
- (7) BPKPAD melakukan transfer ADD langsung ke Rekening Kas Kalurahan setelah dikurangi tagihan Iuran BPJS Kesehatan.

### BAB III PELAPORAN

#### Pasal 16

- (1) Lurah menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Bupati melalui Panewu setiap semester.
- (2) Laporan penggunaan ADD merupakan satu kesatuan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Kalurahan.

### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panewu, DPMK dan Perangkat Daerah lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dan aparat pengawas fungsional lainnya.
- (4) Bamuskal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APB Kalurahan.

### BAB V KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 18

Dalam hal besaran ADD yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan berbeda dengan besaran ADD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, Lurah agar melakukan perubahan penjabaran APB Kalurahan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 29 Desember 2023  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 29 Desember 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 78











LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 78 TAHUN 2023

TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN  
BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

BESARAN ALOKASI DANA DESA SETIAP KALURAHAN BERDASARKAN JUMLAH RT

NO	KALURAHAN	JUMLAH RT	KEBUTUHAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	PONCOSARI	120	1,000,000	120,000,000
2	TRIMURTI	135	1,000,000	135,000,000
3	GADINGSARI	92	1,000,000	92,000,000
4	GADINGHARJO	24	1,000,000	24,000,000
5	SRIGADING	81	1,000,000	81,000,000
6	MURTIGADING	75	1,000,000	75,000,000
7	TIRTOMULYO	66	1,000,000	66,000,000
8	PARANGTRITIS	55	1,000,000	55,000,000
9	DONOTIRTO	68	1,000,000	68,000,000
10	TIRTOSARI	42	1,000,000	42,000,000
11	TIRTOHARGO	27	1,000,000	27,000,000
12	SELOHARJO	73	1,000,000	73,000,000
13	PANJANGREJO	75	1,000,000	75,000,000
14	SRIHARDONO	103	1,000,000	103,000,000
15	SIDOMULYO	100	1,000,000	100,000,000
16	MULYODADI	84	1,000,000	84,000,000
17	SUMBERMULYO	115	1,000,000	115,000,000
18	CATURHARJO	77	1,000,000	77,000,000
19	TRIHARJO	63	1,000,000	63,000,000
20	GILANGHARJO	91	1,000,000	91,000,000
21	WIJIREJO	61	1,000,000	61,000,000
22	TRIWIDADI	106	1,000,000	106,000,000
23	SENDANGSARI	91	1,000,000	91,000,000
24	GUWOSARI	79	1,000,000	79,000,000
25	PALBAPANG	81	1,000,000	81,000,000
26	RINGINHARJO	43	1,000,000	43,000,000
27	BANTUL	93	1,000,000	93,000,000
28	TRIRENGGO	109	1,000,000	109,000,000
29	SABDODADI	38	1,000,000	38,000,000
30	PATALAN	88	1,000,000	88,000,000
31	CANDEN	76	1,000,000	76,000,000
32	SUMBERAGUNG	94	1,000,000	94,000,000
33	TRIMULYO	119	1,000,000	119,000,000
34	SELOPAMIRO	112	1,000,000	112,000,000
35	SRIHARJO	63	1,000,000	63,000,000
36	WUKIRSARI	102	1,000,000	102,000,000
37	KEBONAGUNG	23	1,000,000	23,000,000
38	KARANGTENGAH	41	1,000,000	41,000,000
39	GIRIREJO	46	1,000,000	46,000,000
40	KARANGTALUN	23	1,000,000	23,000,000
41	IMOGLI	32	1,000,000	32,000,000
42	MANGUNAN	47	1,000,000	47,000,000
43	MUNTUK	80	1,000,000	80,000,000
44	DLINGO	47	1,000,000	47,000,000

45	TEMUWUH	64	1,000,000	64,000,000
46	TERONG	42	1,000,000	42,000,000
47	JATIMULYO	55	1,000,000	55,000,000
48	BATURETNO	94	1,000,000	94,000,000
49	BANGUNTAPAN	212	1,000,000	212,000,000
50	JAGALAN	25	1,000,000	25,000,000
51	SINGOSAREN	18	1,000,000	18,000,000
52	JAMBIDAN	55	1,000,000	55,000,000
53	POTORONO	85	1,000,000	85,000,000
54	TAMANAN	52	1,000,000	52,000,000
55	WIROKERTEN	67	1,000,000	67,000,000
56	WONOKROMO	73	1,000,000	73,000,000
57	PLERET	79	1,000,000	79,000,000
58	SEGOROYOSO	48	1,000,000	48,000,000
59	BAWURAN	35	1,000,000	35,000,000
60	WONOLELO	37	1,000,000	37,000,000
61	SITIMULYO	111	1,000,000	111,000,000
62	SRIMULYO	119	1,000,000	119,000,000
63	SRIMARTANI	112	1,000,000	112,000,000
64	PENDOWOHARJO	94	1,000,000	94,000,000
65	TIMBULHARJO	122	1,000,000	122,000,000
66	BANGUNHARJO	127	1,000,000	127,000,000
67	PANGGUNGHARJO	119	1,000,000	119,000,000
68	BANGUNJIWO	146	1,000,000	146,000,000
69	TIRTONIRMOLO	102	1,000,000	102,000,000
70	TAMANTIRTO	92	1,000,000	92,000,000
71	NGESTIHARJO	127	1,000,000	127,000,000
72	ARGODADI	100	1,000,000	100,000,000
73	ARGOREJO	73	1,000,000	73,000,000
74	ARGOSARI	60	1,000,000	60,000,000
75	ARGOMULYO	110	1,000,000	110,000,000
JUMLAH		5,915		5,915,000,000

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIM

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 78 TAHUN 2023

TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN  
BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

BESARAN ALOKASI DANA DESA SETIAP KALURAHAN BERDASARKAN PERHITUNGAN FORMULA RASIO JUMLAH PENDUDUK KALURAHAN, RASIO PENDUDUK MISKIN KALURAHAN, RASIO LUAS WILAYAH KALURAHAN  
DAN RASIO INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS KALURAHAN

NO	NAMA DESA	ALOKASI BERDASAR FORMULA										TOTAL BOBOT	ALOKASI BERDASAR FORMULA	PEMBULATAN		
		JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH PENDUDUK MISKIN			LUAS WILAYAH			INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS (IKG)					
		Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot (30%)	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot (30%)	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot (20%)	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot (20%)			
1	PONCOSARI	13,052	0,01348	0,00404	3,556	0,01744	0,00523	11.775315	0,02317	0,00463	28,2594	0,01636	0,00327	0,01718	369,089,440	369,089,400
2	TRIMURTI	18,064	0,01866	0,00560	4,759	0,02333	0,00700	6.219782	0,01224	0,00245	19,3906	0,01123	0,00225	0,01729	371,428,512	371,428,500
3	GADINGSARI	10,048	0,01038	0,00311	2,825	0,01385	0,00416	8.172270	0,01608	0,00322	18,6883	0,01082	0,00216	0,01265	271,725,832	271,725,800
4	GADINGHARJO	3,817	0,00394	0,00118	1,006	0,00493	0,00148	3.099826	0,00610	0,00122	30,1915	0,01748	0,00350	0,00738	158,499,562	158,499,600
5	SRIGADING	9,533	0,00985	0,00295	2,556	0,01253	0,00376	7.628794	0,01501	0,00300	16,2016	0,00938	0,00188	0,01159	249,017,654	249,017,700
6	MURTIGADING	8,466	0,00874	0,00262	2,046	0,01003	0,00301	4.408195	0,00868	0,00174	18,4398	0,01068	0,00214	0,00950	204,136,937	204,136,900
7	TIRTOMULYO	7,035	0,00727	0,00218	1,653	0,00810	0,00243	4.216972	0,00830	0,00166	30,5153	0,01767	0,00353	0,00980	210,613,345	210,613,300
8	PARANGTRITIS	7,957	0,00822	0,00247	1,743	0,00855	0,00256	11.946409	0,02351	0,00470	14,1716	0,00820	0,00164	0,01137	244,295,661	244,295,700
9	DONOTIRTO	8,338	0,00861	0,00258	2,194	0,01076	0,00323	4.730255	0,00931	0,00186	25,0018	0,01447	0,00289	0,01057	227,006,721	227,006,700
10	TIRTOSARI	4,401	0,00455	0,00136	1,321	0,00648	0,00194	2.405385	0,00473	0,00095	30,5195	0,01767	0,00353	0,00779	167,284,256	167,284,300
11	TIROHARGO	3,017	0,00312	0,00093	928	0,00455	0,00137	3.643303	0,00717	0,00143	33,3908	0,01933	0,00387	0,00760	163,263,119	163,263,100
12	SELOHARJO	12,019	0,01241	0,00372	3,407	0,01670	0,00501	11.171453	0,02199	0,00440	31,3787	0,01817	0,00363	0,01677	360,158,782	360,158,800





73	ARGOREJO	13.040	0.01347	0.00404	2,414	0.01184	0.00355	7.246348	0.01426	0.00285	28.8763	0.01672	0.00334	0.01379	296,165,612	296,165,600		
74	ARGOSARI	9.317	0.00962	0.00289	2,154	0.01056	0.00317	6.441198	0.01268	0.00254	21.5771	0.01249	0.00250	0.01109	238,206,766	238,206,800		
75	ARGOMULYO	14.767	0.01525	0.00458	2,382	0.01168	0.00350	9.561153	0.01882	0.00376	27.1917	0.01574	0.00315	0.01499	322,031,350	322,031,400		
JUMLAH		968,237		1	0.30000	203,953	1.00000	0.30000	508		1	0	1,727	1.00000	0.20000	1.00000	21,481,739,840	21,481,739,700

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIM

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 78 TAHUN 2023

TENTANG  
 TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA  
 UNTUK SETIAP KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

BESARAN ALOKASI DANA DESA SETIAP KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA KALURAHAN	ALOKASI BERDASAR KEBUTUHAN BELANJA WAJIB	ALOKASI BERDASAR FORMULA	ALOKASI UNTUK BAMUSKAL	ALOKASI UNTUK RT	ALOKASI BAGI RATA	ALOKASI SUBSIDI	ALOKASI SELISIH PENGHITUNGAN ADD sebesar 10.329.000	PENERIMAAN ADD SETIAP KALURAHAN
1	PONCOSARI	1.099.873.400,00	369.089.400,00	157.300.000,00	120.000.000,00	50.000.000,00			1.796.262.800,00
2	TRIMURTI	888.141.800,00	371.428.500,00	157.300.000,00	135.000.000,00	50.000.000,00			1.601.870.300,00
3	GADINGSARI	910.595.500,00	271.725.800,00	125.300.000,00	92.000.000,00	50.000.000,00			1.449.621.300,00
4	GADINGHARJO	613.039.700,00	158.499.600,00	93.300.000,00	24.000.000,00	50.000.000,00			938.839.300,00
5	SРИGADING	946.688.200,00	249.017.700,00	125.300.000,00	81.000.000,00	50.000.000,00			1.452.005.900,00
6	MURTIGADING	1.018.595.500,00	204.136.900,00	125.300.000,00	75.000.000,00	50.000.000,00			1.473.032.400,00
7	TIRTOMULYO	977.956.600,00	210.613.300,00	125.300.000,00	66.000.000,00	50.000.000,00			1.429.869.900,00
8	PARANGTRITIS	716.771.300,00	244.295.700,00	125.300.000,00	55.000.000,00	50.000.000,00			1.191.367.000,00
9	DONOTIRTO	860.863.900,00	227.006.700,00	125.300.000,00	68.000.000,00	50.000.000,00			1.331.170.600,00
10	TIRTOSARI	644.586.000,00	167.284.300,00	93.300.000,00	42.000.000,00	50.000.000,00			997.170.300,00
11	TIRTOHARGO	532.039.700,00	163.263.100,00	93.300.000,00	27.000.000,00	50.000.000,00	69.535.600,00	688.600,00	935.827.000,00
12	SELOHARJO	901.502.900,00	360.158.800,00	125.300.000,00	73.000.000,00	50.000.000,00			1.509.961.700,00
13	PANJANGREJO	982.502.900,00	272.532.800,00	125.300.000,00	75.000.000,00	50.000.000,00			1.505.335.700,00
14	SRIHARDONO	960.049.200,00	333.187.000,00	157.300.000,00	103.000.000,00	50.000.000,00			1.603.536.200,00
15	SIDOMULYO	896.956.600,00	322.653.100,00	157.300.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00			1.526.909.700,00
16	MULYODADI	865.410.200,00	280.873.600,00	157.300.000,00	84.000.000,00	50.000.000,00			1.437.583.800,00
17	SUMBERMULYO	901.502.900,00	335.878.600,00	157.300.000,00	115.000.000,00	50.000.000,00			1.559.681.500,00
18	CATURHARJO	757.410.200,00	285.009.500,00	125.300.000,00	77.000.000,00	50.000.000,00	37.995.000,00	688.600,00	1.333.403.300,00
19	TRIHARJO	712.225.000,00	315.330.600,00	157.300.000,00	63.000.000,00	50.000.000,00	22.490.700,00	688.600,00	1.321.034.900,00
20	GILANGHARJO	923.956.600,00	354.207.100,00	157.300.000,00	91.000.000,00	50.000.000,00			1.576.463.700,00
21	WIJIREJO	712.225.000,00	273.073.800,00	125.300.000,00	61.000.000,00	50.000.000,00			1.221.598.800,00

22	TRIWIDADI	1,063,780,800.00	353,762,900.00	125,300,000.00	106,000,000.00	50,000,000.00			1,698,843,700.00
23	SENDANGSARI	964,595,500.00	358,407,400.00	157,300,000.00	91,000,000.00	50,000,000.00			1,621,302,900.00
24	GUWOSARI	869,956,600.00	342,833,900.00	157,300,000.00	79,000,000.00	50,000,000.00			1,499,090,500.00
25	PALBAPANG	766,225,000.00	273,221,600.00	157,300,000.00	81,000,000.00	50,000,000.00			1,327,746,600.00
26	RINGINHARJO	586,039,700.00	188,576,100.00	125,300,000.00	43,000,000.00	50,000,000.00			992,915,800.00
27	BANTUL	694,317,600.00	262,651,300.00	157,300,000.00	93,000,000.00	50,000,000.00			1,257,268,900.00
28	TRIRENGGO	933,049,200.00	368,379,200.00	157,300,000.00	109,000,000.00	50,000,000.00			1,617,728,400.00
29	SABDODADI	473,493,400.00	188,861,500.00	125,300,000.00	38,000,000.00	50,000,000.00	61,195,200.00	688,600.00	937,538,700.00
30	PATALAN	1,108,688,200.00	245,875,900.00	157,300,000.00	88,000,000.00	50,000,000.00			1,649,864,100.00
31	CANDEN	923,956,600.00	310,165,900.00	157,300,000.00	76,000,000.00	50,000,000.00			1,517,422,500.00
32	SUMBERAGUNG	906,049,200.00	318,645,200.00	157,300,000.00	94,000,000.00	50,000,000.00			1,525,994,400.00
33	TRIMULYO	856,317,600.00	348,513,200.00	157,300,000.00	119,000,000.00	50,000,000.00			1,531,130,800.00
34	SELOPAMIORO	1,126,595,500.00	492,937,000.00	157,300,000.00	112,000,000.00	50,000,000.00			1,938,832,500.00
35	SRIHARJO	779,863,900.00	228,695,700.00	125,300,000.00	63,000,000.00	50,000,000.00			1,246,859,600.00
36	WUKIRSARI	928,502,900.00	424,587,400.00	157,300,000.00	102,000,000.00	50,000,000.00			1,662,490,300.00
37	KEBONAGUNG	473,493,400.00	127,582,400.00	93,300,000.00	23,000,000.00	50,000,000.00	167,023,200.00	688,600.00	935,087,600.00
38	KARANGTENGAH	613,039,700.00	189,586,100.00	125,300,000.00	41,000,000.00	50,000,000.00			1,018,925,800.00
39	GIRIREJO	446,493,400.00	193,281,400.00	93,300,000.00	46,000,000.00	50,000,000.00	113,408,600.00	688,600.00	943,172,000.00
40	KARANGTALUN	554,493,400.00	117,649,000.00	93,300,000.00	23,000,000.00	50,000,000.00	96,075,300.00	688,600.00	935,206,300.00
41	IMOGLI	441,947,000.00	96,677,000.00	93,300,000.00	32,000,000.00	50,000,000.00	222,218,700.00	688,600.00	936,831,300.00
42	MANGUNAN	694,039,700.00	230,481,300.00	125,300,000.00	47,000,000.00	50,000,000.00			1,146,821,000.00
43	MUNTUK	743,771,300.00	333,991,200.00	125,300,000.00	80,000,000.00	50,000,000.00	11,509,000.00	688,600.00	1,345,260,100.00
44	DLINGO	739,225,000.00	221,940,100.00	125,300,000.00	47,000,000.00	50,000,000.00			1,183,465,100.00
45	TEMUWUH	802,317,600.00	248,392,200.00	125,300,000.00	64,000,000.00	50,000,000.00			1,290,009,800.00
46	TERONG	680,678,600.00	208,613,800.00	125,300,000.00	42,000,000.00	50,000,000.00			1,106,592,400.00
47	JATIMULYO	712,225,000.00	279,911,700.00	125,300,000.00	55,000,000.00	50,000,000.00	7,662,300.00	688,600.00	1,230,787,600.00
48	BATURETNO	622,132,300.00	233,137,100.00	157,300,000.00	94,000,000.00	50,000,000.00			1,156,569,400.00

49	BANGUNTAPAN	824,771,300.00	445,912,900.00	157,300,000.00	212,000,000.00	50,000,000.00			1,689,984,200.00
50	JAGALAN	378,854,400.00	111,017,700.00	93,300,000.00	25,000,000.00	50,000,000.00	277,088,500.00	688,600.00	935,949,200.00
51	SINGOSAREN	410,400,700.00	106,695,100.00	93,300,000.00	18,000,000.00	50,000,000.00	256,815,300.00	688,600.00	935,899,700.00
52	JAMBIDAN	617,586,000.00	255,389,400.00	125,300,000.00	55,000,000.00	50,000,000.00			1,103,275,400.00
53	POTORONO	680,678,600.00	233,606,600.00	157,300,000.00	85,000,000.00	50,000,000.00			1,206,585,200.00
54	TAMANAN	734,678,600.00	231,778,900.00	157,300,000.00	52,000,000.00	50,000,000.00			1,225,757,500.00
55	WIROKERTEN	649,132,300.00	260,403,700.00	157,300,000.00	67,000,000.00	50,000,000.00			1,183,836,000.00
56	WONOKROMO	721,317,600.00	265,601,100.00	157,300,000.00	73,000,000.00	50,000,000.00			1,267,218,700.00
57	PLERET	797,771,300.00	294,328,800.00	157,300,000.00	79,000,000.00	50,000,000.00			1,378,400,100.00
58	SEGOROYOSO	653,678,600.00	246,458,100.00	125,300,000.00	48,000,000.00	50,000,000.00	43,000,400.00	688,600.00	1,167,125,700.00
59	BAWURAN	617,586,000.00	229,237,000.00	125,300,000.00	35,000,000.00	50,000,000.00	16,278,000.00	688,600.00	1,074,089,600.00
60	WONOLELO	622,132,300.00	193,780,100.00	93,300,000.00	37,000,000.00	50,000,000.00			996,212,400.00
61	SITIMULYO	1,032,234,500.00	381,630,300.00	157,300,000.00	111,000,000.00	50,000,000.00			1,732,164,800.00
62	SRIMULYO	1,036,780,800.00	379,807,000.00	157,300,000.00	119,000,000.00	50,000,000.00			1,742,887,800.00
63	SRIMARTANI	933,049,200.00	342,420,800.00	157,300,000.00	112,000,000.00	50,000,000.00			1,594,770,000.00
64	PENDOWOHARJO	901,502,900.00	394,215,800.00	157,300,000.00	94,000,000.00	50,000,000.00			1,597,020,500.00
65	TIMBULHARJO	928,502,900.00	408,635,400.00	157,300,000.00	122,000,000.00	50,000,000.00			1,666,438,300.00
66	BANGUNHARJO	987,049,200.00	392,671,800.00	157,300,000.00	127,000,000.00	50,000,000.00			1,714,021,000.00
67	PANGGUNGHARJO	946,410,200.00	400,907,300.00	157,300,000.00	119,000,000.00	50,000,000.00			1,673,617,500.00
68	BANGUNJIWO	1,050,141,800.00	573,099,800.00	157,300,000.00	146,000,000.00	50,000,000.00			1,976,541,600.00
69	TIRTONIRMOLO	802,317,600.00	375,401,200.00	157,300,000.00	102,000,000.00	50,000,000.00			1,487,018,800.00
70	TAMANTIRTO	739,225,000.00	392,642,700.00	157,300,000.00	92,000,000.00	50,000,000.00			1,431,167,700.00
71	NGESTIHARJO	721,317,600.00	397,981,300.00	157,300,000.00	127,000,000.00	50,000,000.00	17,169,900.00	688,600.00	1,471,457,400.00
72	ARGODADI	838,410,200.00	354,988,700.00	125,300,000.00	100,000,000.00	50,000,000.00			1,468,699,900.00
73	ARGOREJO	914,863,900.00	296,165,600.00	157,300,000.00	73,000,000.00	50,000,000.00			1,491,329,500.00
74	ARGOSARI	752,863,900.00	238,206,800.00	125,300,000.00	60,000,000.00	50,000,000.00			1,226,370,700.00
75	ARGOMULYO	892,410,200.00	322,031,400.00	157,300,000.00	110,000,000.00	50,000,000.00			1,531,741,600.00
	JUMLAH	59,513,848,800.00	21,481,739,700.00	10,325,500,000.00	5,915,000,000.00	3,750,000,000.00	1,419,465,700.00	10,329,000.00	102,415,885,000.00

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIM



